



BKPSDM
KOTA BANDA ACEH

**TAHUN
2026**

**(RENJA)
RENCANA KINERJA
BKPSDM KOTA BANDA ACEH**

Jalan Tgk. Abu Lam U No.7 Kota Banda Aceh, Kode POS 23242

www.bkpsdm.bandaacehkota.go.id Telepon / Fax: (0651) 33803



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JALAN TGK ABU LAM U NO.7 TELP / FAX (0651) 33803 BANDA ACEH
Website: bkpsdm.bandaacehkota.go.id email:bkpsdm@bandaacehkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH
NOMOR : **1020** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026 serta untuk menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2026.

- Mengingat** :
- 1) Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 11) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Biroksasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 12) Qanun Kata Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Kata Banda Aceh Tahun 2025-2045;
- 13) Qanun Kata Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Kata Banda Aceh Tahun 2025-2029;
- 14) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagaimana pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada tanggal 14 Agustus 2025 M

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANDA ACEH**



Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19731218 199303 1 005



KATA PENGANTAR

RENCANA KERJA (RENJA)
BKPSDM KOTA BANDA ACEH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana KerjaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2026, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Lebih lanjut isi dari Rencana Kerja adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Badan sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh, sedangkan dalam penyusunan Program dan Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi hukum yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Demikian dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana KerjaBKPSDM Kota Banda Aceh, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Banda Aceh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2024 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Banda Aceh

Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh

Tahun 2023-2026..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Kota Banda Aceh..... 21

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPK..... 33

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH 41

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kota Banda Aceh..... 42

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BANDA

BANDA ACEH..... 51

BAB V PENUTUP..... 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh sampai dengan Desember Tahun 2024.....	7
Tabel 2.1.1	Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan..	15
Tabel 2.1.2	Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan..	16
Tabel 2.1.3	Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan..	17
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh	19
Tabel 2.3.1.1	Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.....	21
Tabel 2.3.1.2	Kenaikan Pangkat Tepat Waktu ASN.....	23
Tabel 2.3.1.3	Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang dari Bulan Juli – Desember 2025	24
Tabel 2.3.1.4	Rekapitulasi BUP Tahun 2022 s.d 2025.....	25
Tabel 2.3.1.5	Pejabat Struktural yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.....	27
Tabel 2.3.1.6	Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2019-2025	28
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan RKPK Tahun 2026 BKPSDM Kota Banda Aceh	34
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Tahun 2026.....	43
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kota Banda Aceh	44
Tabel 4.1	Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran	52

BAB 1 PENDAHULUAN

RENCANA KERJA (RENJA)
BKPSDM KOTA BANDA ACEH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka penyusunan Renja, Perangkat Daerah melakukan koorOPDi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen rencana perangkat daerah 5 (lima) tahunan atau disebut Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan renja mengacu pada dokumen RKPD yang selanjutnya

RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun yang direncanakan. Atas dasar tersebut, disusunlah dokumen Rancangan (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2026, sebagai bagian dari proses penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
7. Peraturan Pemerintah Indonesia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026.

Tujuan penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2026 adalah:

1. Mereview capaian pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2025 dan menganalisis kesesuaian dengan target Renstra;
2. Menetapkan program/kegiatan/sub kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2026; dan
3. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum penyusunan Rancangan Renja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, BKPSDM Kota Banda Aceh

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPK

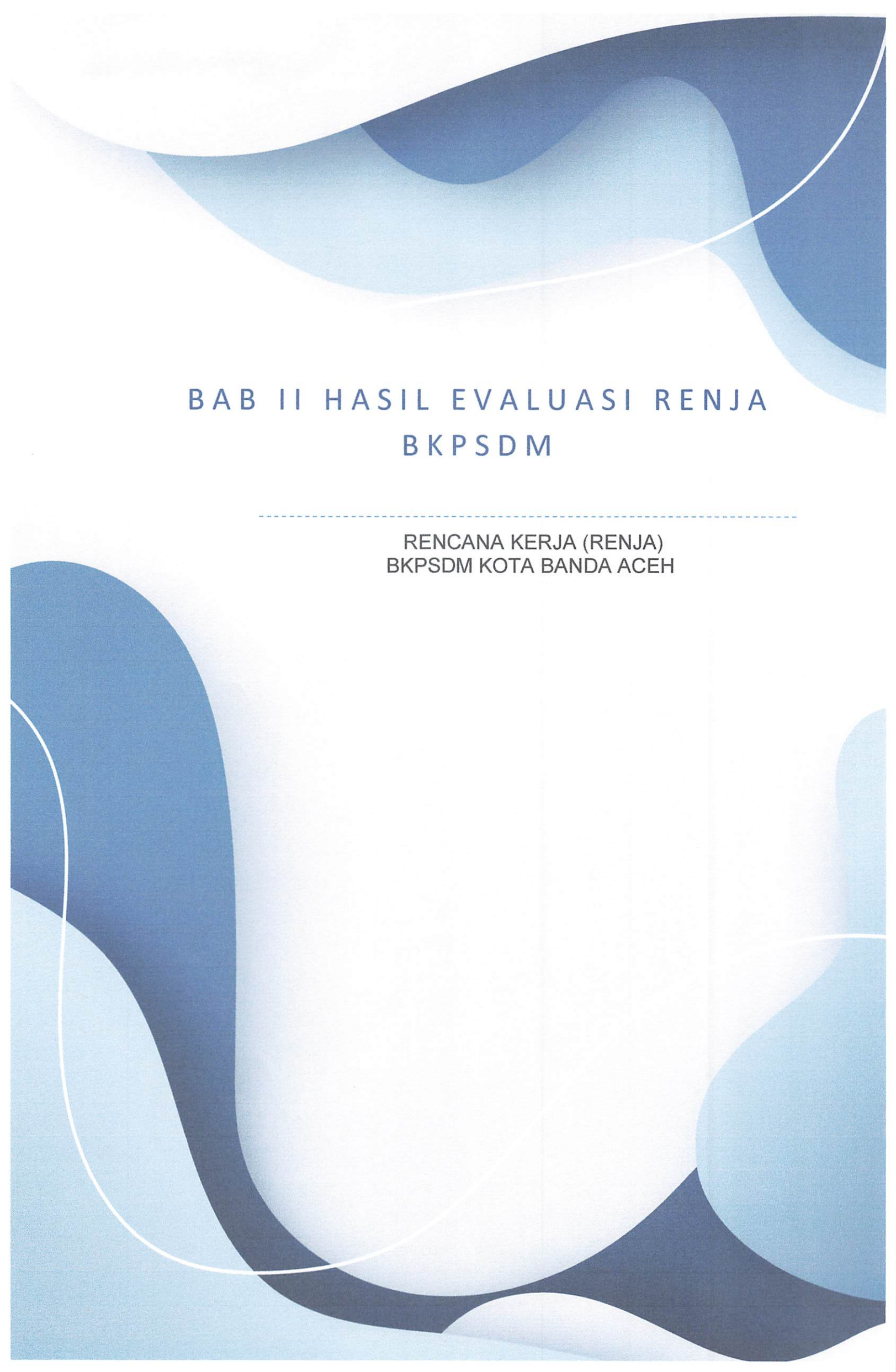
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kota Banda Aceh
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

BAB V PENUTUP



BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM

RENCANA KERJA (RENJA)
BKPSDM KOTA BANDA ACEH

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2024 dan capaian Renstra Tahun 2023-2026 merupakan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024. BKPSDM Kota Banda Aceh melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Program dan Kegiatan diampu oleh 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Kota Banda Aceh sebesar Rp. 9.234.460.459 . Melalui mekanisme perubahan APBK tahun 2024, anggaran BKPSDM Kota Banda Aceh mengalami perubahan sebesar Rp. 9.506.765.462 atau bertambah sebesar 2,9%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh sampai dengan bulan Desember tahun 2024, disajikan melalui tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh
Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024**

Urusan	Bid. Urusan	Kode OPD	Kegiatan	Subkegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Ket			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4		5		6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4	12		
5	3	1			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	70,42	%	100	%	52	%	52%	100	%	48	%	48%	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	%	100	%	100	%	33	%	33%	100	%	25	%	25%	
5	3	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100%	5	dokumen	15	dokumen	75%	
5	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	6	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	dokumen	0	dokumen	0%	
5	3	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	0	laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	0	Laporan	0	Laporan	0%	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	94	%	94%	100	%	48	%	48%	
5	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260	Orang/ Bulan	65	Orang/ Bulan	65	Orang/ Bulan	57	Orang/ Bulan	88%	65	Orang/ Bulan	187	Orang/ Bulan	72%	
5	3	1	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	75%	

Urusan	Bid. Urusan	Kode OPD	Kegiatan	Subkegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Ket		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4	12
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100	%	0	%	0	%	0	%	0%	100	%	25	%	25%	
5	3	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	0	paket	1	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	25%	
5	3	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	0	orang	5	Orang	0	Orang	0%	5	Orang	5	Orang	25%	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	88	%	100	%	56	%	56%	100	%	64	%	64%	
5	3	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	75%	
5	3	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	0	paket	0	paket	0	paket	0%	12	Paket	12	Paket	50%	
5	3	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	0	paket	0	paket	0	paket	0%	2	Paket	2	Paket	100%	
5	3	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	75%	
5	3	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	dokumen	0	dokumen	0%	

Urusan	Bid. Urusan	Kode OPD	Kegiatan	Subkegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)				Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Ket		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4	12
						yang Disediakan															
5	3	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	24	laporan	25	Laporan	34	Laporan	136%	25	Laporan	83	Laporan	83%	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	0	%	100	%	33	%	33%	100	%	50	%	50%	
5	3	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	0%	0	unit	0	unit	0%	
5	3	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	0%	1	unit	1	unit	100%	
5	3	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	Unit	0	unit	8	Unit	8	unit	100%	8	unit	16	unit	50%	
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	%	100	%	100	%	100%	100	%	75	%	75%	
5	3	1	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	1	laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	75%	

Urusan	Bid. Urusan	Kode OPD	Kegiatan	Subkegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Ket			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4	12	
5	3	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	1	laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	75%	
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	97	%	100	%	50	%	50%	100	%	51	%	51%	
5	3	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	0	unit	0	unit	0	unit	0%	9	unit	9	unit	50%	
5	3	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	unit	9	unit	9	unit	9	unit	100%	2	Unit	20	Unit	56%	
5	3	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	unit	20	unit	20	unit	20	unit	100%	20	unit	60	unit	75%	
5	3	1	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	0	unit	1	unit	0	unit	0%	1	unit	1	unit	25%	

Urusan	Bid. Urusan	Kode OPD	Kegiatan	Subkegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Ket			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4	12	
5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi dan Data Kepegawaian ASN	100	%	53	%	100	%	83	%	96%	100	%	79	%	79%	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	100	%	100	%	100	%	80	%	80%	100	%	99	%	99%	
5	3	2	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9	dokumen	3	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	7	dokumen	78%	
5	3	2	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	2	dokumen	67%	
5	3	2	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	75%	
5	3	2	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	1	lembaga	1	Lembaga	0	Lembaga	0%	1	Lembaga	2	Lembaga	200%	
5	3	2	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem informasi Kepegawaian	20	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100%	5	dokumen	15	dokumen	75%	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yang Dimutasi dan Promosi pada Jabatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	75	%	75%	

Urusan	Bid. Urusan	Kode OPD	Kegiatan	Subkegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Ket			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4		5		6		7	8=7/6	9		10=5+7+9	11=10/4	12		
5	3	2	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	75%	
5	3	2	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	dokumen	1	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	75%	
5	3	2	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	dokumen	1	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	75%	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	%	123	%	100	%	104	%	104%	100	%	82	%	82%	
5	3	2	2.03	0003	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	468	orang	144	orang	117	orang	122	orang	104%	117	orang	383	orang	82%	
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	100	%	33	%	100	%	100	%	100%	100	%	58	%	58%	
5	3	2	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	dokumen	1	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	75%	
5	3	2	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20	Orang	0	orang	5	Orang	5	Orang	100%	5	Orang	10	Orang	50%	
5	3	2	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	Laporan	0	laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	Laporan	50%	

Urusan	Bid. Urusan	Kode OPD	Kegiatan	Subkegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Ket			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4	12
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	100	%	50	%	32,10	%	68	%	68%	32,30	%	77	%	77%	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	100	%	50	%	100	%	35	%	35%	100	%	92	%	92%	
5	4	2	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	461	orang	0	orang	230	orang	161	orang	70%	230	orang	391	orang	85%	
5	4	2	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	dokumen	1	dokumen	100%	

Urusan	Bid. Urusan	Kode OPD	Kegiatan	Subkegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Ket			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)		Tingk at Realis asi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)			Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4	12
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	%	50	%	100	%	100	%	100%	100	%	63	%	63%	
5	4	2	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	Laporan	0	laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	Laporan	50%	
5	4	2	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4	dokumen	1	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	75%	

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Faktor Penyebab
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rasionalisasi anggaran
2	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rasionalisasi anggaran
			Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Rasionalisasi anggaran
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasionalisasi anggaran
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rasionalisasi anggaran
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rasionalisasi anggaran
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rasionalisasi anggaran
			pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rasionalisasi anggaran
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rasionalisasi anggaran
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rasionalisasi anggaran

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2	Program Kepegawaian Daerah		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
			Pengelolaan Promosi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

2.1.3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **melebihi** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi Sub Kegiatan *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan. Dari rencana awal 25 laporan, terealisasi sebanyak 34 laporan atau 136%. Kelebihan capaian ini terjadi karena tingginya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, khususnya mengenai uji kompetensi dan seleksi terbuka JPT Pratama, periodisasi kenaikan pangkat PNS golongan IV/c ke atas, penginputan SKP melalui e-kinerja BKN, pengadaan ASN, serta rotasi dan mutasi pejabat administrasi. Selain itu, realisasi kegiatan juga mencakup pendampingan Pj.

Walikota dalam evaluasi kinerja, pengambilan SK kebutuhan ASN/PPPK, penandatanganan kerja sama, rapat koordinasi nasional, hingga partisipasi dalam pelatihan dan forum konsultasi publik. Dengan cakupan yang luas dan kompleks, realisasi yang melebihi target ini menunjukkan kebutuhan anggaran tambahan untuk mendukung efektivitas koordinasi dan konsultasi, sekaligus memperkuat kualitas manajemen ASN dan penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target capaian program Renstra tahun 2024 dapat mempengaruhi capaian target Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh secara keseluruhan sampai akhir periode Renstra. Pada Kegiatan pengembangan kompetensi teknis tidak terealisasi sesuai dengan target sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terpenuhinya minimal 20 JP pertahun bagi setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut

1. Terhadap target kinerja yang tidak tercapai akan di evaluasi kembali dengan peningkatan kualitas koordinasi dan konsultasi dengan TAPD Kota Banda Aceh agar memprioritaskan sub kegiatan yang sangat penting agar tidak dirasionalkan anggarannya. Sebelum penyusunan perubahan anggaran dilakukan komunikasi intens untuk memutuskan prioritas dan besaran anggaran serta dampak dari program yang tidak/ditunda pelaksanaan nya.
2. Menyusun perencanaan sesuai dengan target serta kegiatan yang belum tercapai sebelumnya dan mempertimbangkan faktor penyebab tidak berjalannya atau tidak tercapainya kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal. Mengidentifikasi skala resiko jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau di tunda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Oleh karena itu analisis kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh dilakukan terhadap indikator kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel- tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Profesional ASN (IP-JASN)			55	56	57	58	76,81	70,7	58	-	Kategori Baik
1	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi			77	78	79	80	88,29	88,30	80	-	Nilai indeks pelayanan kategori Baik
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan			31,97%	32,10%	32,30%	32,80%	2,7%	3,33%	32,80%	-	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap indikator kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025 sampai dengan juni 2025 yang terdapat pada tabel 2.2 dapat diketahui bahwa:

- a. Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi BKPSDM Kota Banda Aceh semester I tahun 2025:
 - Nilai indeks pelayanan pada BKPSDM Kota Banda Aceh rata rata adalah 3,532 dengan nilai survey kepuasan masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 88,30 dan mutu pelayanan termasuk kategori B dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah baik. Pelaksanaan Survei Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi dalam hal ini dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya agar hasil yang

- dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas, dengan jumlah responden kuisioner sebanyak 132 orang. Survei tersebut berlangsung dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Metode perhitungan dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \frac{\text{Total NRR per unsur}}{\text{Total unsur yang isi}} \\
 &= \frac{38,853}{11} \\
 &= 3,5321
 \end{aligned}$$

Untuk memudahkan intepretasi terhadap penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \text{IKM Interval} \times 25 \\
 &= 3,5321 \times 25 \\
 &= \underline{88.30}
 \end{aligned}$$

- Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah yaitu Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dengan nilai 3,21.
- b. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Indikator kinerja tersebut baru terealisasi sebesar 3.33% dari target yang telah ditetapkan sebesar 32,30% dikarenakan masih adanya rasionalisasi anggaran sampai dengan tahun 2025. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal sampai dengan bulan Juni 2025 sebanyak 124 orang dari jumlah seluruh ASN 3720 orang, kondisi jumlah ASN bulan Juni 2025. Rincian perhitungan nya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal} &= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal} \times 100}{\text{Jumlah ASN}} \\
 &= \frac{124 \times 100}{3720} \\
 &= 3,33 \%
 \end{aligned}$$

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

1. Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi

a. Nilai sistem merit Pemerintah Kota Banda Aceh

Tabel 2.3.1.1 Nilai Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

No	Tahun	Aspek								Total	Indeks	Kategori
		Perencanaan Kebutuhan	Pengadaan	Pengembangan Karir	Promosi dan Mutasi	Manajemen Kinerja	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Perlindungan dan Pelayanan	Sistem Informasi			
1	2021	30	36	67,5	12,5	67,5	32,5	6	15	267	0,67	Baik
2	2022	20	38	55	25	57,5	30	12	15	252,5	0,63	Baik
3	2023	38	40	42,5	25	40	25	8	15	221	(*)	Kurang
4	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indeks sistem merit Pemerintah Kota banda Aceh pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan tahun 2021, Pada Tahun 2023 pada kolom total (*) mengapa tidak memiliki hasil indeks ini karena didasari pada Klasifikasi Nilai Indeks pada Sistem Merit, nilai total dibawah 250 tidak ada nilai Indeks. berdasarkan hasil penilaian dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) (untuk tahun 2024 Hasil penilaian Penerapan Sistem Merit belum disampaikan ke Pemerintah Kota Banda Aceh dikarenakan perubahan regulasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk tahun 2025 masih dalam penelusuran login Aplikasi SIPINTER, karena akses masuk login sudah tidak berlaku semenjak perubahan regulasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

b. Pelaksanaan Seleksi dan Rotasi JPT Pratama

Pengisian JPT Pratama dilakukan melalui mutasi/rotasi dari satu jabatan ke jabatan yang lain atau pengisian melalui seleksi terbuka kompetitif dan akuntabel.Pengisian melalui seleksi terbuka dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menegaskan bahwa pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS pada tingkat nasional atau antar kabupaten /kota dalam 1 (satu) Provinsi sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku.

Pengisian melalui melalui mutasi/rotasi dari satu jabatan ke jabatan yang lainBerdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menegaskan bahwa pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dengan persyaratan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) dan paling lama 5 (lima) Tahun

Pelaksanaan seleksi terbuka dan uji kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seleksi terbuka sejumlah 4 (empat) jabatan lowong yaitu :
 - Kepala Dinas Tenaga Kerja
 - Kepala Dinas Sosial
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH.
2. Pelaksanaan uji kompetensi sejumlah 2 (dua) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu :
 - Staf Ahli Wali kota Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
3. Perencanaan seleksi terbuka untuk 1 (satu) jabatan PPTP yaitu Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

c. Kenaikan Pangkat ASN

Pada tahun 2025, jumlah penerbitan Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu sebanyak 331 Lembar, sedangkan 46 usulan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan penolakan angka kredit belum cukup untuk kenaikan pangkat, tidak memenuhi syarat pendidikan, tidak dapat melampirkan untuk skkj dan pertek wasdal, tidak dapat melampirkan penetapan formasi madya dari menpan, Ybs tidak dapat melampirkan Surat Tugas Belajar karena ybs melanjutkan pendidikan setelah diangkat dalam PNS, YBS merupakan formasi JF dan sudah pernah diberikan KP reguler 1xYBS diusulkan naik pangkat dengan AK melalui prosedur KP JF (sesudah diangkat dalam JF nya), tidak dapat melampirkan ijazah profesi untuk kenaikan jenjang.

Hal ini disebabkan berkas administrasi yang diusulkan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.3.1.2 Kenaikan Pangkat Tepat Waktu ASN

No	Tahun	Jumlah PNS yang mengusulkan Pangkat	Jumlah PNS yang Batal Naik Pangkat Tepat Waktu	Jumlah PNS yang Naik Pangkat Tepat Waktu
1	2018	920	15	905
2	2019	734	13	721
3	2020	593	32	561
4	2021	610	11	599
5	2022	837	33	804
6	2023	852	24	821
7	2024	636	18	618
8	2025	331	46	285

d. Pengisian pejabat dan mutasi pegawai

Pada periode bulan April tahun 2024 sampai dengan Juni tahun 2025, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melaksanakan mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dikarenakan dalam masa jabatan Walikota untuk proses mutasi/rotasi harus melalui izin dari KASN, BKN, Kemenpan, Kemendagri dan Gubernur. Secara umum, mutasi/rotasi bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) jika dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah pelantikan. Hal inilah yang mengakibatkan proses mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas membutuhkan proses administrasi yang memerlukan waktu yang panjang.

Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2025

NO	JABATAN	TERISI	KOSONG	JUMLAH
1	ESELON II	33	4	37
2	ESELON III	143	23	166
3	ESELON IV	167	16	183
JUMLAH				386

Rekapitulasi Jumlah Mutasi Jabatan Struktural Januari s.d Juni 2025

NO	BULAN	ESELON			JUMLAH
1		II	III	IV	
		-	-	-	

2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja

a. Kondisi Kepegawaian Pemerintah Kota Banda Aceh

Komposisi ASN yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.1.3 Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang dari
Bulan Januari – Juni 2025

TAHUN	GOLONGAN RUANG ASN				JUMLAH PEGAWAI ASN	JUMLAH PEGAWAI NON ASN
	I	II	III	IV		
Januari	3	688	3143	983	4817	1436
Februari	3	687	3139	982	4811	3108
Maret	3	684	3147	978	4812	3108
April	3	654	3174	980	4811	2420
Mei	3	654	3172	981	4810	2419
Juni	3	627	3200	990	4820	2386

Sumber : BKPSDM Banda Aceh, 2025

Secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) keadaan Juni 2025 sebanyak 4820 orang dan untuk pegawai Non ASN sebanyak 2386 orang .

b. Pengadaan ASN

Sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 347 Tahun 2024 perihal pengadaan ASN Tahun 2024 Mekanisme seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2024.

mengusulkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai di Pemerintah Kota

Banda Aceh telah melaksanakan pengadaan PPPK dengan total formasi Teknis 1.222 orang.

- c. Batas Usia Pensiun (BUP) PNS
- Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja selama bertahun-tahun kepada Pemerintah. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Rekapitulasi BUP tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1.4 Rekapitulasi BUP tahun 2021 s.d. 2025

No	Jenis BUP	Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
Tahun 2021				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c KE ATAS	64 Orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b KE BAWAH	82 Orang	
3	Meninggal Dunia		29 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		4 Orang	
Jumlah			179 orang	
Tahun 2022				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c KE ATAS	87 Orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b KE BAWAH	96 Orang	
3	Meninggal Dunia		8 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		2 Orang	
Jumlah			193 Orang	
Tahun 2023				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c KE ATAS	65 Orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b KE BAWAH	135 Orang	
3	Meninggal Dunia		17 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun			
Jumlah			217 Orang	
Tahun 2024				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c KE ATAS	63 Orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b KE BAWAH	75 Orang	
3	Meninggal Dunia		13 Orang	
Jumlah			151 Orang	
Tahun 2025				

No	Jenis BUP	Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c KE ATAS	13 Orang	
	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b KE BAWAH	117 Orang	
	Meninggal Dunia		10 Orang	
	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		1 Orang	
	Jumlah		141 Orang	

d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2019, 425 ASN telah mengikuti diklat struktural dari total 656 jabatan yang ada dengan target sebesar 48%. Realisasi yang tercapai adalah 64,79%, berhasil melampaui target yang ditetapkan, ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat struktural dalam melaksanakan tugas mereka.

Namun pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan dalam jumlah pejabat yang mengikuti diklat struktural dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, hanya 356 pejabat dari 655 jabatan yang mengikuti diklat dengan target sebesar 54% dan realisasi 54,35%. Pada tahun 2021, jumlah tersebut sedikit menurun menjadi 349 pejabat dari 642 jabatan dengan target 60% dan realisasi 54,36%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan anggaran, pandemi COVID-19 pada periode ini, atau perubahan pelaksanaan kegiatan prioritas. Namun demikian, upaya-upaya untuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan kota Banda Aceh harus terus dilakukan agar Pemerintah kota Banda Aceh dapat memberikan pelayanan maksimal.

Pada tahun 2022 dan 2023 target pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural turun dari tahun sebelumnya karena terjadi pengurangan jumlah pejabat struktural. Hal tersebut disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Penyadagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional, sebanyak 270 orang pejabat pengawas beralih menjadi pejabat fungsional, imbas dari kebijakan penyederhanaan birokrasi

Pada tahun 2024, realisasi yang tercapai adalah 41,6%, berhasil melampaui target yang ditetapkan, karena pada tahun 2024, Pemerintah Kota Banda Aceh

mengirimkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 20 orang dan Pelatihan Kepemimpinan nasional Tk. II sebanyak 5 orang ke Puslatbang KHAN LAN RI, setelah 5 tahun sebelumnya tidak ada penyelenggaraan diklat struktural. Pelaksanaan Diklat Struktural sampai dengan akhir semester 1 tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target 32,30 % realisasi yang dicapai 47,2% atau 14,9% lebih tinggi dari target. Hal ini menunjukkan koordinasi yang optimal dan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat struktural.

sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1.5 Pejabat Struktural yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Total Jabatan	Jumlah Penjabat ASN yang Telah Mengikuti Diklat Sruktural	Target (%)	Realisasi (%)
2019	656	425	48	64,79
2020	655	356	54	54,35
2021	642	349	60	54,36
2022	376	143	40	38,03
2023	367	136	31,97	37,06
2024	387	161	32,10	41,6
2025	342	161	32,30	47,2

Dari tabel di atas menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jumlah total jabatan pada tahun 2023 dan 2024, hal tersebut disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sebagian jabatan pengawas (eselon IV) dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah disetarakan kedalam jabatan fungsional tertentu.

- a. Pada tahun 2024 ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sejumlah 90 orang, terdiri dari Tugas Belajar, dan pendidikan dan bimbingan teknis.

Tabel 2.3.1.6 Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2018-2025

Tahun	Izin Belajar	Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan/Bimtek	Izin Belajar Politeknik	Tugas Belajar	Total
2018	53	18	84	35	190
2019	66	31	84	30	211
2020	70	14	84	33	201
2021	61	25	74	21	181
2022	28	6	74	21	123
2023	-	31	-	101	132
2024	-	22	-	100	122
2025	-	17	-	73	90

Pada Tahun 2025 tidak ada lagi izin belajar karena terbitnya SE Menpan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan dan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan terbitnya SE Menpan dan Peraturan Walikota tersebut dimana tidak ada lagi penyebutan izin belajar bagi PNS yang kemudian izin belajar tersebut di gabung menjadi tugas belajar.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada BKPSDM Kota Banda Aceh saat ini adalah:

- a. Belum optimal nya manajemen kepegawaian khususnya berbasis Assesment Center yang berdampak pula pada system merit. Sehubungan

belum tersedianya anggaran sesuai kebutuhan untuk melaksanakan assessment center. Target kepegawaian yang harus dicapai secara nasional IPASN, Indeks NSPK, Sistem Merit.

- b. Pemenuhan hak pegawai untuk mengembangkan kompetensi melalui Diklat 20 JP per tahun masih belum maksimal karena ketersediaan anggaran belum sesuai dengan analisis pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Kota Banda Aceh.
- c. Jabatan Fungsional yang belum terisi. Perlunya informasi dan sosialisasi ke OPD untuk mengisi Kebutuhan Jabatan Fungsional karena keterbatasan anggaran. Karena untuk mengisi sebuah jabatan fungsional harus melalui mekanisme persyaratan sesuai dengan Permenpan no 15 Tahun 2019, Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 serta Permenpan Jabatan Fungsional Masing-masing. Mekanisme pengisian jabatan fungsional :
 - 1. SKPD Menyusun kebutuhan Formasi JF
 - 2. SKPD mengusul rekomendasi formasi JF ke instansi Pembina
 - 3. Uji Kompetensi

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian prioritas pembangunan, terhadap capaian program nasional

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diundangkan pada 31 Oktober 2023. UU ASN ini menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi ASN dan kebutuhan masyarakat. Dalam UU ASN yang baru, setidaknya memuat tujuh agenda transformasi. 1) Transformasi Rekrutmen dan Jabatan; 2) Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional; 3) Percepatan Pengembangan Kompetensi; 4) Penataan Tenaga Non-ASN; 5) Reformasi Pengelolaan Kinerja dan

Kesejahteraan ASN; 6) Digitalisasi Manajemen ASN, 7) Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi. Tujuh agenda transformasi tersebut menjadi pilar bangunan reformasi birokrasi. Tujuan utamanya pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Prioritas pembangunan yang berkaitan dengan BKPSDM yaitu Transformasi Rekrutmen dan Jabatan serta Percepatan Pengembangan Kompetensi. Transformasi Rekrutmen dan Jabatan ASN ditandai dengan fleksibilitas penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi. Jabatan disederhanakan menjadi lebih terbuka untuk mendukung organisasi agile (merespons perubahan) dan kolaboratif. Jabatan ASN dikelompokkan menjadi manajerial dan nonmanajerial.

Terkait penetapan kebutuhan ASN, Menteri tidak lagi bisa menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sesuai instansi (UU 5/2014). Permasalahannya, instansi tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumberdayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi, karena setiap ada perubahan formasi pada jenis tertentu harus seizin Menteri. Selain itu, penambahan formasi tidak dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga alokasi sumberdaya dan anggaran bisa tidak selaras dengan tingkat kebutuhan.

Pada UU ASN 2023, Menteri menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia dan mengalokasikan kepada masing-masing instansi pemerintah, namun tidak lagi secara rigid mengatur jenis jabatan dan jumlah formasi pada masing-masing instansi pemerintah. Instansi pemerintah diberikan fleksibilitas dalam menentukan formasi masing-masing jabatan sesuai kebutuhannya, mengacu pada alokasi jumlah pegawai dan anggaran.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

2.3.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Banda Aceh adalah:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa target ASN mengikuti diklat minimal 20 JPL/ASN pertahun dan Pasal 65 yang menyebutkan mengenai larangan perekrutan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.
- b. Era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan;
- c. Koordinasi OPD dengan Instansi Pembina yang kurang intens.

2.3.4.1 Peluang

Dalam memberikan pelayanan prima kepada Aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, BKPSDM Kota Banda Aceh juga memiliki peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah:

- a. Adanya dukungan dana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- b. Adanya potensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil.
- c. Adanya regulasi untuk melakukan pembinaan, pengembangan karier dan pengawasan kepada aparatur agar meningkatkan kedisipinan dan professional.
- d. Terbukanya kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kualitas SDM aparatur.
- e. Terbukanya peluang peningkatan kompetensi berkelas dunia dan menjadikan ASN smart siap melayani.

- f. Transparansi data kepegawaian agar terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 95 Tahun 2018

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti

Penyajian isu-isu penting meliputi permasalahan yang harus ditangani secara berkesinambungan yaitu:

- a. Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan
- b. Pelaksanaan *Talent pool* untuk menempatkan PNS sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan (*the right man and the right place*)
- c. Mengintegrasikan layanan kepegawaian daerah dengan layanan kepegawaian Nasional
- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Non ASN untuk menjadi formasi PPPK
- e. Melakukan koordinasi dengan lembaga pembina instansi untuk membuka seleksi uji kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan fungsional yang kosong di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuka formasi CASN.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPK

Rancangan RKPK merupakan langkah awal ataupun dasar dalam menyusun rancangan Rencana Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Dalam Rancangan RKPK tercantum program-program yang dijadikan pedoman penyusunan Kegiatan. Program yang disusun oleh BKPSDM Kota Banda Aceh perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan RKPK sehingga dapat dirumuskan kedalam program/Kegiatan/Sub kegiatan untuk diajukan menjadi rencana kerja, disajikan melalui tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan RKPK Tahun 2026
BKPSDM Kota Banda Aceh**

Kode						Rancangan RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1						2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	3					KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
5	3	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BANDA ACEH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100%	9.932.316.911	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BANDA ACEH	1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. 80 Indeks 2. BB	9.808.402.119	
5	3	1	201			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	60.109.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10.155.200	
5	3	1	201	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	48.514.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.155.200	
5	3	1	201	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	BANDA ACEH	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	3 Dokumen	7.298.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	BANDA ACEH	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	3 Dokumen	1.000.100	
5	3	1	201	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4.296.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.999.900	
5	3	1	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.836.898.396	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	12 Laporan	8.825.993.903	
5	3	1	202	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BANDA ACEH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang / bulan	7.836.898.396	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BANDA ACEH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang / bulan	8.825.993.903	
5	3	1	202	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	

Kode					Rancangan RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	3	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	138.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia		0	
5	3	1	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BANDA ACEH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	38.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BANDA ACEH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0	
5	3	1	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BANDA ACEH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BANDA ACEH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
5	3	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	BANDA ACEH	Persentase Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	280.612.235	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	1 Laporan	107.667.400	
5	3	1	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BANDA ACEH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	17.439.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BANDA ACEH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.627.500	
5	3	1	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BANDA ACEH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	40.987.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BANDA ACEH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	13.457.500	
5	3	1	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BANDA ACEH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.424.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BANDA ACEH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	953.700	
5	3	1	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BANDA ACEH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	62.239.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BANDA ACEH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.628.700	
5	3	1	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.080.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	
5	3	1	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	152.442.635	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	85.000.000	
5	3	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BANDA ACEH	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	199.128.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	1 Laporan	49.844.236	

Kode						Rancangan RPKK					Hasil Analisis Kebutuhan					
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1						2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	3	1	207	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BANDA ACEH	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BANDA ACEH	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	
5	3	1	207	0005		Pengadaan Mebel	BANDA ACEH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	31.560.900	Pengadaan Mebel	BANDA ACEH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	567.736	
5	3	1	207	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BANDA ACEH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	167.567.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BANDA ACEH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	49.276.500	
5	3	1	208			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANDA ACEH	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.113.920.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	12 Laporan	524.715.000	
5	3	1	208	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	480.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	361.500.000	
5	3	1	208	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	633.420.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.215.000	
5	3	1	209			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANDA ACEH	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	303.148.380	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	12 Laporan	290.026.380	
5	3	1	209	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BANDA ACEH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	251.748.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BANDA ACEH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	234.488.000	
5	3	1	209	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BANDA ACEH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	27.267.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BANDA ACEH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	27.267.600	
5	3	1	209	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BANDA ACEH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.237.780	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BANDA ACEH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	3.259.780	

Kode						Rancangan RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Catatan Penting
1						2	4	5	6	7	8	9	10	11	13
5	3	1	209	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BANDA ACEH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.895.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BANDA ACEH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.011.000
5	3					KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN				
5	3	2				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BANDA ACEH	PERSENTASE PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN DATA KEPEGAWAIAN ASN	100%	1.656.491.300	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BANDA ACEH	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	53 Indeks	542.152.600
5	3	2	201			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BANDA ACEH	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	782.048.300	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BANDA ACEH	Jumlah pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	59.904.600
5	3	2	201	0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	95.500.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	30.315.400
5	3	2	201	0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BANDA ACEH	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	454.499.600	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BANDA ACEH	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	29.589.200
5	3	2	201	0005		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	65.603.600	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	0
5	3	2	201	0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BANDA ACEH	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	115.950.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BANDA ACEH	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0
5	3	2	201	0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	50.495.100	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0
5	3	2	202			Mutasi dan Promosi ASN	BANDA ACEH	Persentase PNS yang Dimutasi dan Promosi pada Jabatan	100%	565.699.500	Mutasi dan Promosi ASN	BANDA ACEH	Jumlah Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan ASN antar daerah	10 Dokumen	134.249.500

Kode					Rancangan RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	3	2	202	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	103.740.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	69.400.000	
5	3	2	202	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BANDA ACEH	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	105.505.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BANDA ACEH	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	60.600.000	
5	3	2	202	0003	Pengelolaan Promosi ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	356.454.500	Pengelolaan Promosi ASN	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	4.249.500	
5	3	2	203		Pengembangan Kompetensi ASN	BANDA ACEH	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100%	137.585.000	Pengembangan Kompetensi ASN	BANDA ACEH	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN		0	
5	3	2	203	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BANDA ACEH	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	1500 Orang	60.125.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BANDA ACEH	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0	
5	3	2	203	0003	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BANDA ACEH	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	77.460.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BANDA ACEH	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	0 Orang	0	
5	3	2	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BANDA ACEH	Persentase Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	100%	171.158.500	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BANDA ACEH	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	347.998.500	
5	3	2	204	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	50.500.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0	
5	3	2	204	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BANDA ACEH	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	55.916.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BANDA ACEH	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	300.000.000	
5	3	2	204	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	64.742.500	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	47.998.500	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BANDA ACEH	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	100%	747.146.700	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BANDA ACEH	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	646%	714.819.500	
5	4	2	201		Pengembangan Kompetensi Teknis	BANDA ACEH	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	100%	124.902.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	BANDA ACEH	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Laporan	402.819.800	

Kode						Rancangan RPKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1						2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	4	2	201	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BANDA ACEH	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	230 orang	Rp124.902.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BANDA ACEH	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	230 orang	402.819.800		
5	4	2	202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BANDA ACEH	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	622.244.700	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BANDA ACEH	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	311.999.700		
5	4	2	202	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Rp21.400.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BANDA ACEH	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	299.999.700		
5	4	2	202	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	Rp600.844.700	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BANDA ACEH	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	12.000.000		
							Jumlah		12.335.954.911						11.065.374.219	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BKPSDM Kota Banda Aceh tidak mempunyai Program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2026 yang diusulkan melalui Musrenbang Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA (RENJA)
BKPSDM KOTA BANDA ACEH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional mempedomani Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kebijakan berbasis data dan informasi. Diperkuat dengan pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara serta peningkatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, diperlukan penguatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan stabilitas wilayah melalui penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menciptakan Wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai. Hal-hal di atas juga perlu ditunjang dengan penguatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah; pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi; serta penguatan kerja sama antarwilayah dan peran distrik dalam peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di sisi lain, perlu dilakukan penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur yang berhubungan dengan sumber daya aparatur adalah pelaksanaan sistem merit ASN, manajemen talenta ASN, dan pengembangan kompetensi ASN.

Salah satu Arah kebijakan BKN meliputi Penataan kelembagaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan pembangunan Proses Bisnis BKN dilakukan untuk mendukung dan merespon kebijakan pemerintah terkait dengan fungsi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga tercipta tata laksana BKN yang sinergis, harmonis, efektif, dan efisien dalam upaya menghadapi tantangan,

perubahan yang begitu cepat, serba digitalis di era Transformasi Teknologi Informasi yang berkembang sangat cepat.

Dari telaah kebijakan nasional di atas, yang berhubungan dengan tupoksi BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu pelaksanaan sistem merit ASN, manajemen talenta, pengembangan kompetensi ASN, manajemen PNS dan PPPK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kota Banda Aceh

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJM perlu ditetapkan tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun tujuan dari BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu Meningkatnya Profesionalitas ASN.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun sasaran dari BKPSDM Kota Banda Aceh adalah Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT.

a. Tujuan

- Meningkatnya Profesionalitas ASN.

b. Sasaran

- Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM tahun 2023 - 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja BKPSDM Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3
Tujuan: Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN (IP-JASN)	78
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	Indek Sistem MERIT	0,62

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2026 BKPSDM akan melaksanakan 3 program, 13 kegiatan, 29 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 11.065.374.219,- sesuai dengan pagu Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2026. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kota Banda Aceh

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM Kota Banda Aceh

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3	1			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		1. 80 Indeks 2. BB	9.808.402.119			1. 81 Indeks 2. BB	9.798.398.819
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BANDA ACEH	10 Dokumen	10.155.200	PAD		10 Dokumen	10.155.500
5	3	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BANDA ACEH	5 Dokumen	7.155.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	7.155.500
5	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	BANDA ACEH	3 Dokumen	1.000.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	1.000.000
5	3	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BANDA ACEH	2 Dokumen	1.999.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	2.000.000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	BANDA ACEH	12 Laporan	8.825.993.903	DAU		12 Laporan	8.825.993.239

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BANDA ACEH	74 Orang/Bulan	8.825.993.903	Dana Alokasi Umum (DAU)		59 Orang/bulan	8.825.993.239
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	BANDA ACEH	1 Laporan	107.667.400	PAD		1 Laporan	107.803.700
5	3	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BANDA ACEH	1 Paket	1.627.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	1.722.100
5	3	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BANDA ACEH	5 Paket	13.457.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	13.461.300
5	3	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BANDA ACEH	2 paket	953.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 paket	990.700
5	3	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BANDA ACEH	4 Paket	6.628.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	6.629.600
5	3	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BANDA ACEH	25 Laporan	85.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Laporan	85.000.000
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	BANDA ACEH	1 Laporan	49.844.236	PAD		1 Laporan	35.000.000
5	3	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BANDA ACEH	1 Unit	567.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 unit	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BANDA ACEH	5 Unit	49.276.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 unit	35.000.000
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	BANDA ACEH	12 Laporan	524.715.000	PAD		12 Laporan	519.445.000
5	3	1	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BANDA ACEH	12 Laporan	361.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	356.000.000
5	3	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BANDA ACEH	12 Laporan	163.215.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	163.445.000
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	BANDA ACEH	12 Laporan	290.026.380	PAD		12 Laporan	300.001.380
5	3	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BANDA ACEH	9 Unit	234.488.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9 Unit	234.488.000
5	3	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BANDA ACEH	1 Unit	27.267.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	27.267.600

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BANDA ACEH	25 Unit	3.259.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Unit	3.245.780
5	3	1	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BANDA ACEH	1 Unit	25.011.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	35.000.000
5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	BANDA ACEH	53 Indeks	542.152.600	PAD		54 Indeks	1.442.253.678
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	BANDA ACEH	1 Laporan	59.904.600	PAD		1 Laporan	541.148.003
5	3	2	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BANDA ACEH	1 Dokumen	30.315.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	64.458.200
5	3	2	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BANDA ACEH	2 Dokumen	29.589.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	159.430.116
5	3	2	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BANDA ACEH	0 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	66.259.636
5	3	2	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BANDA ACEH	0 Lembaga	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Lembaga	200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	3	2	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem informasi Kepegawaian	BANDA ACEH	0 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	51.000.051
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan ASN antar daerah	BANDA ACEH	10 Dokumen	134.249.500	PAD		10 Dokumen	529.888.925
5	3	2	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BANDA ACEH	2 Dokumen	69.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	104.777.400
5	3	2	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BANDA ACEH	6 Dokumen	60.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	89.681.940
5	3	2	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BANDA ACEH	2 Dokumen	4.249.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	335.429.585
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BANDA ACEH	1 Laporan	347.998.500	PAD		1 Laporan	371.216.750
5	3	2	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BANDA ACEH	12 Orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Orang	300.000.000
5	3	2	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BANDA ACEH	1 Laporan	47.998.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	71.216.750

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	BANDA ACEH	16,87%	714.819.500	PAD		16,91%	1.303.026.322
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BANDA ACEH	1 Laporan	402.819.800	PAD		1 Laporan	400.000.000
5	4	2	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	BANDA ACEH	230 Orang	402.819.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		230 Orang	400.000.000
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BANDA ACEH	1 Laporan	311.999.700	PAD		1 Laporan	903.026.322
5	4	2	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BANDA ACEH	1 Laporan	299.999.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	300.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	4	2	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	BANDA ACEH	1 Dokumen	12.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	603.026.322
Jumlah									11.065.374.219				12.543.678.819



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RENCANA KERJA (RENJA)
BKPSDM KOTA BANDA ACEH

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Rencana KerjaBKPSDM Kota Banda Aceh merupakan dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Rencana Kerjatahun 2026 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2026 beserta pendanaan indikatifnya.

Pendanaan indikatif adalah kebutuhan pendanaan yang di perlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, sehingga dapat mencapai target dari program dan kegiatan tersebut.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif BKPSDM Kota Banda Aceh pada tahun 2026 dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
								Volum e	Satuan		
1					2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					11.065.374.219	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					11.065.374.219	
5	3				KEPEGAWAIAN					10.350.554.719	
5	3	1			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Banda Aceh	1. 80 2. BB	Indeks	9.808.402.119	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Banda Aceh	10	Dokumen	10.155.200	
5	3	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	5	Dokumen	7.155.200	
5	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Banda Aceh	3	Dokumen	1.000.100	
5	3	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banda Aceh	2	Laporan	1.999.900	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Banda Aceh	12	Laporan	8.825.993.903	
5	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	74	Orang / bulan	8.825.993.903	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Banda Aceh	1	Laporan	107.667.400	
5	3	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	1	paket	1.627.500	
5	3	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	5	Paket	13.457.500	
5	3	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	2	Paket	953.700	
5	3	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Banda Aceh	4	paket	6.628.700	
5	3	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	25	laporan	85.000.000	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Banda Aceh	1	Laporan	49.844.236	
5	3	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Banda Aceh	1	unit	567.736	
5	3	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Banda Aceh	5	unit	49.276.500	

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
								Volum e	Satuan		
1					2	3	4	5	6	7	8
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Banda Aceh	12	Laporan	524.715.000	
5	3	1	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banda Aceh	12	laporan	361.500.000	
5	3	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	12	laporan	163.215.000	
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Banda Aceh	12	Laporan	290.026.380	
5	3	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Banda Aceh	9	unit	234.488.000	
5	3	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banda Aceh	1	unit	27.267.600	
5	3	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banda Aceh	25	unit	3.259.780	
5	3	1	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banda Aceh	1	unit	25.011.000	
5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	Banda Aceh	53	Indeks	542.152.600	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	Banda Aceh	1	Laporan	59.904.600	
5	3	2	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Banda Aceh	1	Dokumen	30.315.400	
5	3	2	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Banda Aceh	2	Dokumen	29.589.200	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan ASN antar daerah	Banda Aceh	10	Dokumen	134.249.500	
5	3	2	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Banda Aceh	2	Dokumen	69.400.000	
5	3	2	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Banda Aceh	6	Dokumen	60.600.000	
5	3	2	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Banda Aceh	2	Dokumen	4.249.500	
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Banda Aceh	1	Laporan	347.998.500	
5	3	2	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Banda Aceh	12	orang	300.000.000	
5	3	2	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Banda Aceh	1	Laporan	47.998.500	

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
5	4	2	1					Volume	Satuan		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Banda Aceh	16,87	Persen	714.819.500	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Banda Aceh	1	Laporan	402.819.800	
5	4	2	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Banda Aceh	230	orang	402.819.800	
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Banda Aceh	1	Laporan	311.999.700	
5	4	2	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Banda Aceh	1	Laporan	299.999.700	
5	4	2	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Banda Aceh	1	Dokumen	12.000.000	
Jumlah										11.065.374.219	

BAB V PENUTUP

RENCANA KERJA (RENJA)
BKPSDM KOTA BANDA ACEH

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Ranwal Renja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2026 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

a. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana KerjaBKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2026 yang sudah terpola dengan sistematis, terarah dan berkelanjutan memudahkan bagi semua pihak untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan dapat menjadi acuan pengukuran hasil kinerja organisasi bagi semua pihak yang berkepentingan, baik dalam pelaksanaan, tugas pokok dan fungsi maupun dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran OPD, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf BKPSDM Kota Banda Aceh secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - Melaksanakan Rancangan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rancangan Renja tahun 2026.

b. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Renja Tahun 2026, selanjutnya Rancangan Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Demikianlah Rencana KerjaBKPSDM Kota Banda Aceh disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Sehingga Rencana Kerja ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh tahun 2025-2029.

Banda Aceh, 14 Agustus 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia



Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19731218 199303 1 005